

BAB 4

ANALISIS DAN RENCANA POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KOTA MAGELANG

4.1 Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan Luas Wilayah Kota Magelang

Analisis kebutuhan RTH publik berdasarkan luas wilayah dianalisis sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu RTH publik minimal memiliki luas 20% dari seluruh luas wilayah kota. Sesuai ketentuan tersebut, maka Kota Magelang yang memiliki luas total sebesar 1.855, 83 Hektar minimal harus memiliki RTH publik seluas 371,17 Hektar. Perhitungan kekurangan RTH publik dilakukan dengan cara mencari selisih antara kebutuhan RTH publik dengan RTH publik eksisting. Berikut ini merupakan rincian kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik masing-masing kecamatan.

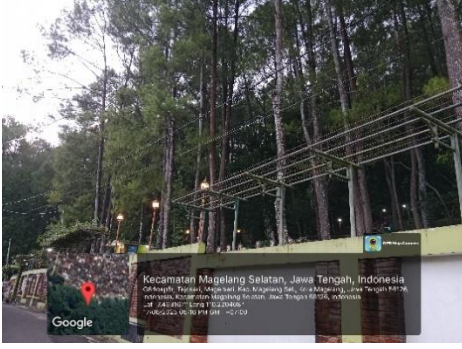
Tabel 4. 1 Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Kebutuhan RTH Publik (ha)	RTH Publik Eksisting (ha)	Kekurangan RTH Publik (ha)
Magelang Selatan	713,28	142,66	135,74	6,92
Magelang Tengah	510,51	102,10	26,29	75,81
Magelang Utara	632,03	126,41	26,49	99,92
Kota Magelang	1.855,83	317,17	188,52	182,64

Sumber: Penyusun, 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut, seluruh kecamatan di Kota Magelang belum mencapai luas minimal RTH publik berdasarkan luas wilayah. RTH publik yang ada saat ini diantaranya berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan, jalur hijau dan lainnya. Pengelolaan RTH publik tersebut dilakukan oleh beberapa pihak seperti DPUPR, DLH, maupun Disperkim sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu staff DPUPR Kota Magelang. Berikut merupakan dokumentasi ketika survei terkait RTH publik eksisting di Kota Magelang.

Tabel 4. 2 Dokumentasi RTH Publik Eksisting di Kota Magelang

Jenis RTH Publik	Kecamatan	Dokumentasi
Rimba Kota (Gunung Tidar)	Kecamatan Magelang Selatan	
Taman Kota (Taman Alun-Alun Kota Magelang)	Kecamatan Magelang Tengah	
Taman Kecamatan (Blooms Skatepark)	Kecamatan Magelang Selatan	
Taman Kelurahan (Taman Badaan)	Kecamatan Magelang Utara	

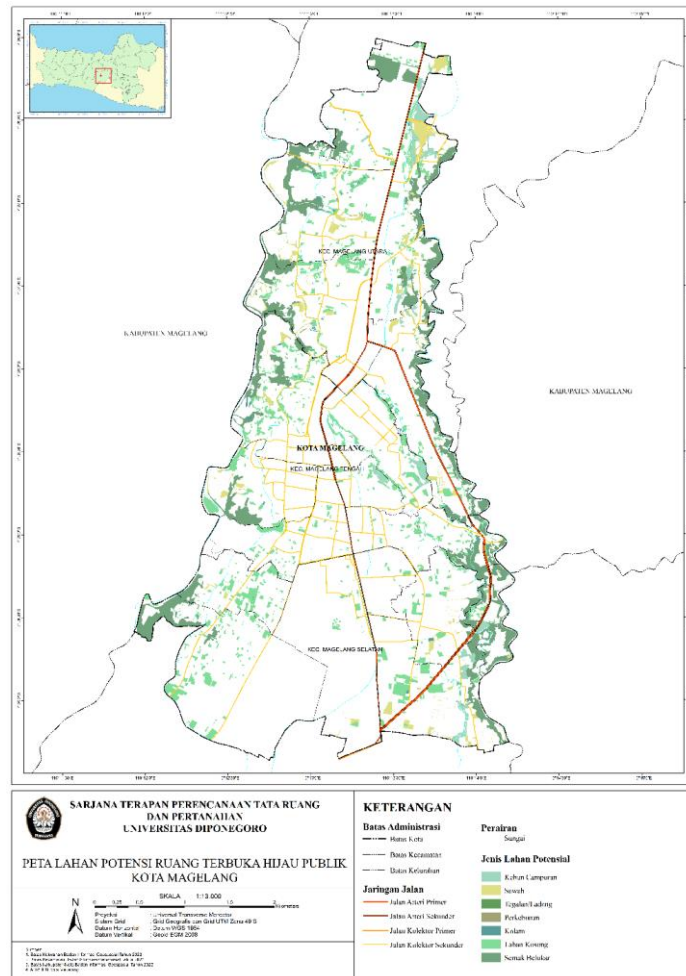
Jenis RTH Publik	Kecamatan	Dokumentasi
Taman RW (Taman Panti Perri)	Kecamatan Magelang Tengah	
Jalur Hijau	Kecamatan Magelang Selatan	

Sumber: Penyusun, 2025

Kecamatan Magelang Utara memiliki kekurangan luas RTH publik paling besar di antara kecamatan yang lain yaitu sebesar 99,916 Hektar. Sedangkan Kecamatan Magelang Selatan memiliki kekurangan dibawah 10 Hektar. Secara keseluruhan kekurangan RTH publik sebesar 182,65 Hektar atau sekitar 9,84%, sesuai standar yang telah ditetapkan yaitu Permen Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 luas minimal RTH publik adalah 20% dari total luas wilayah untuk mendukung kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Kualitas lingkungan tersebut salah satunya berkaitan dengan kualitas udara, menurut Alamsyah *et al.*, (2021) penyediaan RTH yang memadai merupakan salah satu upaya penting dalam menekan pencemaran udara.

4.2 Analisis Lahan Potensial untuk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Analisis lahan potensi dilakukan guna mengidentifikasi lahan-lahan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi RTH. Data yang diolah berupa data penggunaan lahan eksisting dikurangi dengan lahan terbangun, data Ruang Terbuka Hijau publik eksisting, dan data kawasan lindung termasuk data LSD. Hasil dari pengolahan tersebut berupa lokasi yang potensial untuk pengembangan RTH. Berikut merupakan peta persebaran lahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang.



Sumber: Penyusun, 2025

Gambar 4. 1 Peta Lahan Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil berupa lahan potensi seluas 316,09 Hektar dengan jenis lahan yang berpotensi diantaranya lahan berupa semak belukar, lahan kosong, dan lahan pertanian yang meliputi kebun campuran, sawah, dan tegalan/ladang. Berikut ini merupakan rincian luas lahan potensial di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Magelang.

Tabel 4. 3 Luas Lahan Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang

Kecamatan	Luas (ha)	Kebutuhan RTH Publik (ha)	RTH Publik Eksisting (ha)	Kekurangan RTH Publik (ha)	Potensi RTH (ha)
Magelang Selatan	713,28	142,66	135,74	6,92	92,28
Magelang Tengah	510,51	102,10	26,29	75,81	79,42
Magelang Utara	632,03	126,41	26,49	99,92	144,38
Kota Magelang	1.855,83	371,17	188,52	182,65	316,09

Sumber: Penyusun, 2025

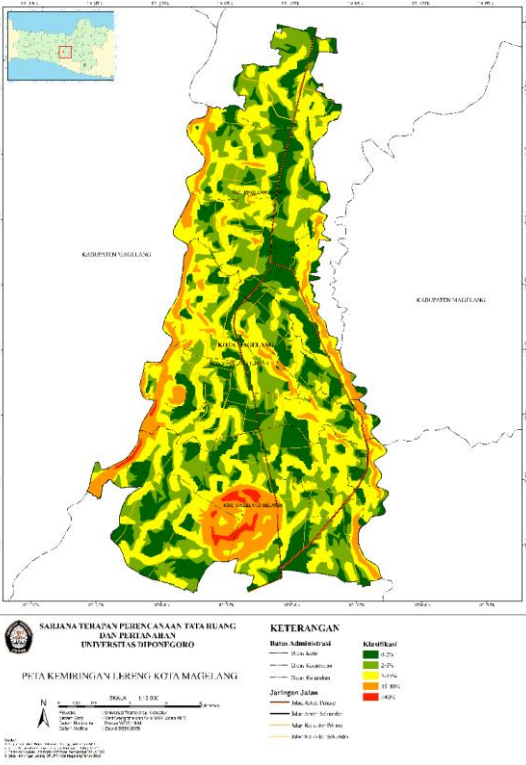
Kecamatan Magelang Utara mempunyai luas lahan potensi terbesar diantara dua kecamatan yang lain. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kebutuhannya yang juga paling besar daripada kecamatan lainnya. Dari ketiga kecamatan tersebut apabila luasan lahan potensialnya digunakan untuk memenuhi kekurangan luas RTH publik di Kota Magelang, dari ketiga kecamatan tersebut semuanya masih memiliki sisa lahan. Dengan kata lain semua kecamatan dapat terpenuhi standar luas minimal RTH publiknya yaitu 20% dari luas wilayahnya. Bahkan Kecamatan Magelang Selatan memiliki sisa luas lahan potensi sebesar 85,36 Hektar, angka tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Magelang Selatan sisa luas lahan potensi yang paling luas. Lahan-lahan yang berpotensi tersebut tidak semua memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga perlu analisis prioritas lahan untuk menentukan lahan mana yang sebaiknya dikembangkan dahulu. Melalui analisis prioritas lahan, nantinya dapat diidentifikasi lahan yang paling strategis untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kemiringan lereng, penggunaan lahan, aksesibilitas, dan status hak tanah.

4.3 Analisis Prioritas Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik

Analisis prioritas lahan potensi RTH dilakukan guna menyusun urutan lahan-lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH publik setelah dilakukannya identifikasi terhadap lahan yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk pencapaian target 20% RTH publik. Dalam menentukan prioritas lokasi potensi RTH publik memerlukan pertimbangan dari beberapa aspek seperti penggunaan lahan, aksesibilitas, kemiringan lereng, dan status hak tanah. Berikut ini merupakan skor dan bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam menentukan lahan prioritas untuk potensi RTH publik yang telah dilakukan penyesuaian bobot setiap variabel terhadap kondisi Kota Magelang.

Tabel 4. 4 Variabel Penggunaan Lahan untuk Penentuan Prioritas Lahan Potensi RTH publik

Peta	Variabel	Parameter	Skor	Bobot
	Penggunaan Lahan	Lahan Kosong	3	35%
		Semak Belukar	2	

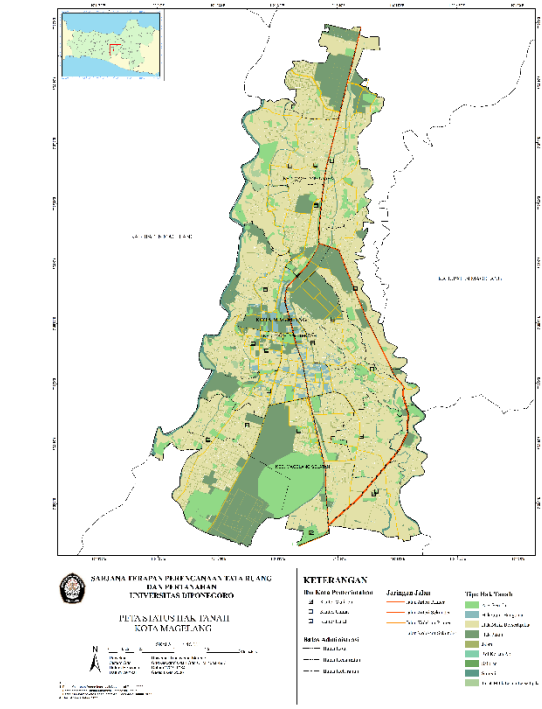
Peta	Variabel	Parameter	Skor	Bobot
		Kemiringan Lereng >15%	1	

Sumber: Modifikasi Penyusun (2025), (Achsani, 2015; Artandio et al., 2019; Widiyawati, 2024)

Tingkat kemiringan lereng yang paling sesuai untuk lokasi Ruang Terbuka Hijau publik berada pada kemiringan lereng yang datar hingga landai. Pada kondisi tersebut masyarakat dapat beraktivitas di RTH publik dengan aman.

Tabel 4. 6 Variabel Tipe Hak Tanah untuk Penentuan Prioritas Lahan Potensi RTH publik

Peta	Variabel	Parameter	Skor	Bobot
	Tipe Hak Tanah	Aset Daerah	3	30%
		Hak Pakai	2	

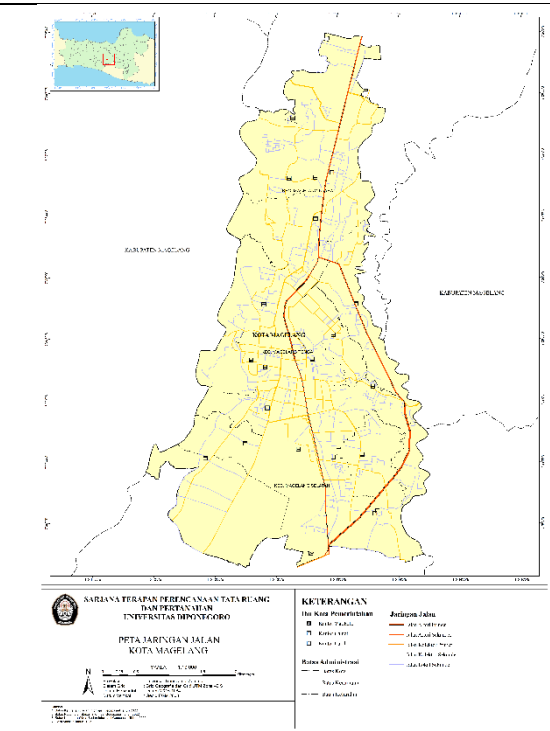
Peta	Variabel	Parameter	Skor	Bobot
		Hak Milik	1	

Sumber: Modifikasi Penyusun (2025), (Achsan, 2015; Artandio et al., 2019; Widiyawati, 2024)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik memiliki beberapa hambatan, salah satunya berkaitan dengan hak atas kepemilikan lahan dan keterbatasan dana. Parameter yang digunakan terkait status lahan adalah lahan yang memiliki status dengan peluang dapat dijadikan RTH publik diantaranya adalah lahan aset pemerintah daerah, lahan berstatus hak pakai, hak milik. Aset pemerintah daerah memiliki skor tertinggi diantara parameter yang lain dikarenakan apabila pengembangan RTH publik menggunakan lahan bertipe hak milik pemerintah daerah maka dapat meminimalkan biaya pengeluaran. Lain halnya dengan lahan bertipe hak milik yang memiliki skor terendah karena berkemungkinan mengeluarkan biaya yang lebih saat dilakukan pembebasan lahan.

Tabel 4. 7 Variabel Aksesibilitas untuk Penentuan Prioritas Lahan Potensi RTH publik

Peta	Variabel	Parameter	Skor	Bobot
	Aksesibilitas	Jalan Arteri	3	20%
		Jalan Kolektor	2	

Peta	Variabel	Parameter	Skor	Bobot
		Jalan Lokal	1	

Sumber: Modifikasi Penyusun (2025), (Achsan, 2015; Artandio et al., 2019; Widiyawati, 2024)

Tingkat kemudahan aksesibilitas dapat ditentukan berdasarkan hierarki jaringan jalan yang ada di sekeliling lokasi Ruang Terbuka Hijau publik (Shakia *et al.*, 2020). Sehingga lokasi RTH yang menjadi prioritas diutamakan berada pada sekitar jaringan jalan. Berdasarkan Dokumen Standar Khusus Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penentuan RTH yang salah satunya berupa taman perkotaan lokasinya maksimal berada pada jarak 240 meter dari daerah terbangun. Jarak tersebut merupakan rekomendasi untuk pengoptimalisasian fungsi vegetasi untuk perbaikan iklim mikro. Maka dari itu, masing-masing klasifikasi Jaringan jalan dilakukan *buffer* dengan jarak 240 meter.

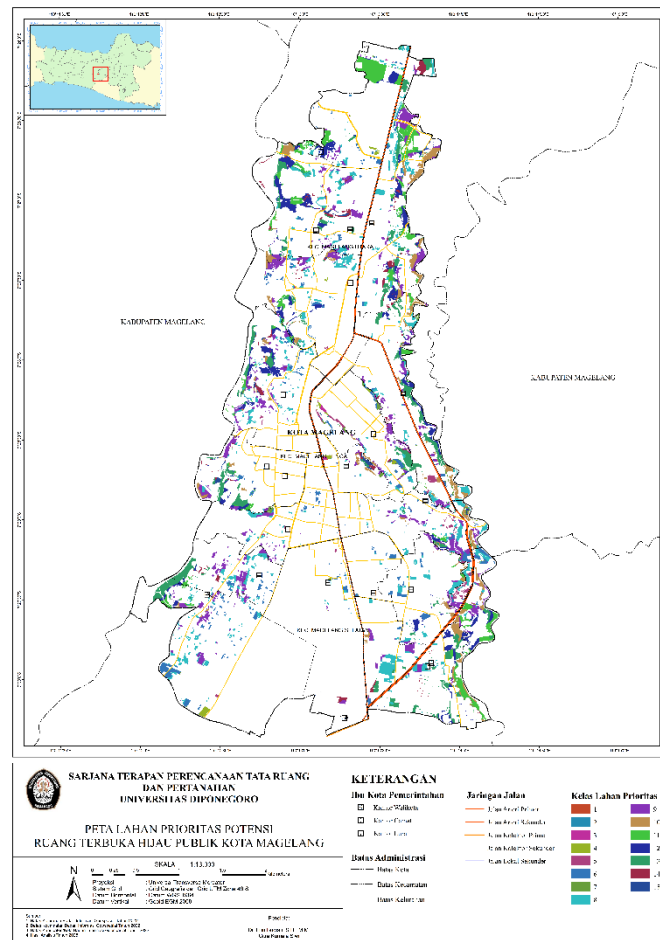
Tabel 4. 8 Skor dan Bobot Variabel untuk Penentuan Prioritas Lahan Potensi RTH Publik

Variabel	Parameter	Skor	Bobot	Skor*Bobot
Penggunaan Lahan	Lahan Kosong	3	35%	1,05
	Semak Belukar	2		0,70
	Pertanian	1		0,35
Kemiringan Lereng	Kemiringan Lereng 0-5%	3	15%	0,45
	Kemiringan Lereng 5-15%	2		0,30
	Kemiringan Lereng >15%	1		0,15
Tipe Hak Tanah	Aset Daerah	3	30%	0,90

Variabel	Parameter	Skor	Bobot	Skor*Bobot
	Hak Pakai	2		0,60
	Hak Milik	1		0,30
Aksesibilitas	Jalan Arteri	3	20%	0,60
	Jalan Kolektor	2		0,40
	Jalan Lokal	1		0,20

Sumber: Penyusun, 2025

Varibel, parameter, skor, dan bobot yang digunakan dalam analisis ini bersumberkan dari beberapa literatur yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi Kota Magelang. Maka dari itu, variabel, parameter, skor, dan bobot yang diterapkan dalam penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada wilayah lain karena setiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda. Setelah menentukan variabel selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai akhir yang berasal dari skor dikalikan bobot. Nilai akhir tersebutlah yang menentukan prioritas lahan potensial melalui teknik analisis spasial berupa *overlay (intersect)*.



Sumber: Penyusun, 2025

Gambar 4. 2 Peta Prioritas Lokasi Potensi RTH Publik Kota Magelang

Lahan-lahan yang termasuk dalam kategori prioritas selanjutnya dikelompokkan berdasarkan perhitungan kelas interval atas hasil penjumlahan skor akhir. Pembagian data dalam kelas-kelas interval dilakukan menggunakan metode *Sturges*. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menghitung jangkauan (*range*) yaitu selisih dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil, selanjutnya menghitung banyaknya kelas, dan yang terakhir adalah menghitung interval kelas. Berikut ini merupakan rincian terkait pembagian kelas prioritas untuk lahan potensial.

Tabel 4. 9 Penentuan Kelas Prioritas Lahan Potensial

Prioritas	Interval Bobot	
1	2,87	3
2	2,74	2,86
3	2,61	2,73
4	2,47	2,60
5	2,34	2,46
6	2,20	2,33
7	2,07	2,19
8	1,94	2,06
9	1,80	1,93
10	1,67	1,79
11	1,54	1,66
12	1,40	1,53
13	1,27	1,39
14	1,13	1,26
15	1	1,12

Sumber: Penyusun, 2025

Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode *Sturges* berupa 15 kelas prioritas. Dengan demikian, lahan prioritas potensi RTH publik di Kota Magelang dikelompokkan menjadi 15 kelas. Berikut ini merupakan rincian luas lahan prioritas berdasarkan kelas prioritas dan jenis hak tanah di masing-masing kecamatan.

Tabel 4. 10 Luas Lahan Prioritas Potensi RTH Publik di Kota Magelang

Kelas Prioritas	Kecamatan	Luas Masing-Masing Jenis Hak (ha)				Total Luas (h)
		Aset Pemda	Hak Pakai	Milik Pribadi		
				Hak Milik Bersertipikat	Tanah Milik Belum Bersertipikat	
1	Magelang Selatan	0,0055	0	0	0	0,0055
	Magelang Tengah	0,0180				0,0180

Kelas Prioritas	Kecamatan	Luas Masing-Masing Jenis Hak (ha)				Total Luas (h)
		Aset Pemda	Hak Pakai	Milik Pribadi		
				Hak Milik Bersertipikat	Tanah Milik Belum Bersertipikat	
	Magelang Utara	0,0122				0,0122
Subtotal 1		0,0357	0	0	0	0,0357
2	Magelang Selatan	0,0522	0	0	0	0,0522
	Magelang Tengah	0,0091				0,0091
	Magelang Utara	0,0222				0,0222
Subtotal 2		0,0834	0	0	0	0,0834
3	Magelang Selatan	0,0060	0,0463		0	0,0524
	Magelang Tengah	0,0212	0,5005			0,5217
	Magelang Utara	0,0409	0,0619			0,1028
Subtotal 3		0,0682	0,6087	0	0	0,6769
4	Magelang Selatan	0,0320	0,9890	0	0	1,0211
	Magelang Tengah	0,1006	1,0136			1,1142
	Magelang Utara	0,0263	0,5184			0,5447
Subtotal 4		0,1589	2,5211	0	0	2,6800
5	Magelang Selatan	0,0323	0,1045	0,0963	0	0,2331
	Magelang Tengah	0,0268	1,3674	1,6974		3,0917
	Magelang Utara	0,0453	0,1090	0,9192		1,0734
Subtotal 5		0,1044	1,5809	2,7129	0	4,3982
6	Magelang Selatan	0,0185	1,6043	8,0137	0	9,6365
	Magelang Tengah	0,0058	2,6401	3,3747	0,0416	6,0623
	Magelang Utara	0,0519	0,2495	4,1990	0,1385	4,6388
Subtotal 6		0,0762	4,4939	15,5874	0,1801	20,3376
7	Magelang Selatan	0,0344	0,0708	0,0024	0	0,1077
	Magelang Tengah	0,0103	1,3844	0,5393		1,9340
	Magelang Utara	0,0775	0,3023	0,2478		0,6276

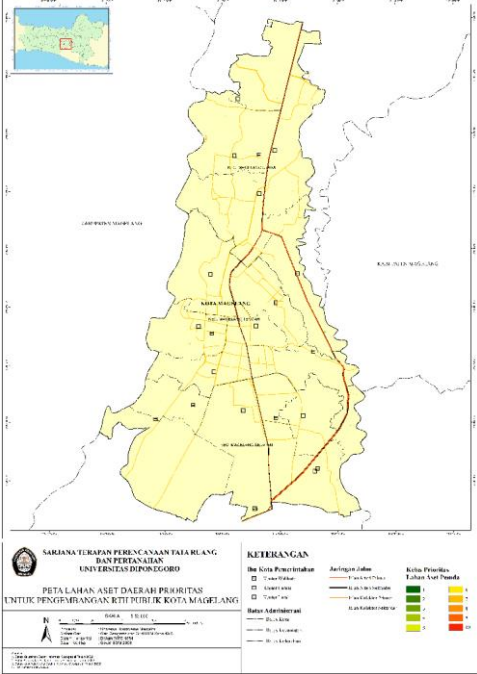
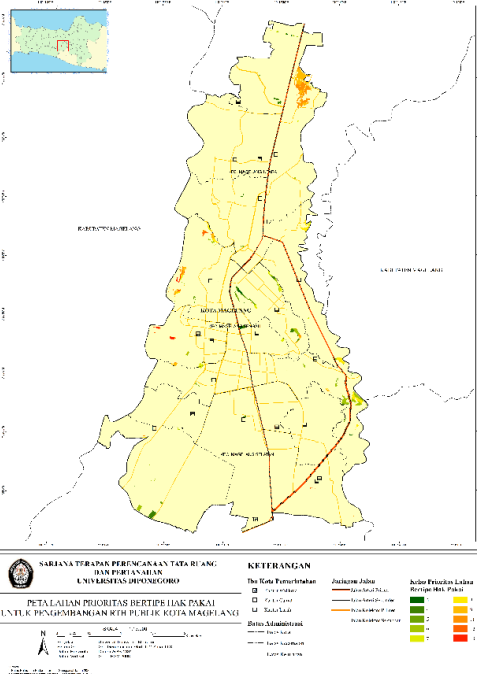
Kelas Prioritas	Kecamatan	Luas Masing-Masing Jenis Hak (ha)				Total Luas (h)
		Aset Pemda	Hak Pakai	Milik Pribadi		
				Hak Milik Bersertipikat	Tanah Milik Belum Bersertipikat	
Subtotal 7		0,1221	1,7575	0,7896	0	2,6693
8	Magelang Selatan	0	1,0072	17,3926	0	18,3998
	Magelang Tengah	0	1,2959	10,5302	0,2395	12,0656
	Magelang Utara	0,1047	0,9608	18,6833	0,2786	20,0273
Subtotal 8		0,1047	3,2638	46,6060	0,5181	50,4927
9	Magelang Selatan	0	0,0042	13,1198	0	13,1240
	Magelang Tengah	0,0117	1,7418	13,6433	1,0313	16,4281
	Magelang Utara	0,0265	3,2978	14,3631	1,3615	19,0490
Subtotal 9		0,0382	5,0438	41,1263	2,3928	48,6011
10	Magelang Selatan	0,0005	0	6,5208	0	6,5212
	Magelang Tengah	0,0005		3,7602	0,6578	4,4185
	Magelang Utara	0,0012		12,0522	1,5882	13,6416
Subtotal 10		0,0022	0	22,3331	2,2460	24,5813
11	Magelang Selatan	0	0,0790	8,2185	0,0000	8,2975
	Magelang Tengah		0,9196	1,1763	0,0000	2,0959
	Magelang Utara		3,7918	16,8699	0,2387	20,9005
Subtotal 11		0	4,7904	26,2648	0,2387	31,2939
12	Magelang Selatan	0	0,0141	6,7471	0,0000	6,7612
	Magelang Tengah		0,6218	6,0341	0,0356	6,6916
	Magelang Utara		0,0001	19,2014	0,3857	19,5872
Subtotal 12		0	0,6360	31,9827	0,4213	33,0400
13	Magelang Selatan	0		12,3310	0	12,3310
	Magelang Tengah		0,6135	9,2875	0,0641	9,9651
	Magelang Utara			18,0869	0,6603	18,7472
Subtotal 13		0	0,6135	39,7054	0,7243	41,0433

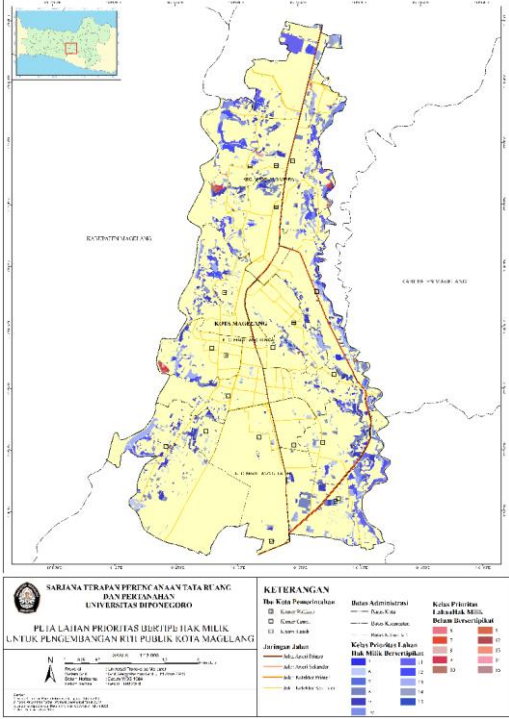
Kelas Prioritas	Kecamatan	Luas Masing-Masing Jenis Hak (ha)				Total Luas (h)
		Aset Pemda	Hak Pakai	Milik Pribadi		
				Hak Milik Bersertipikat	Tanah Milik Belum Bersertipikat	
14	Magelang Selatan	0	0	1,5072	0,0000	1,5072
	Magelang Tengah			1,9016	0,0000	1,9016
	Magelang Utara			4,6069	0,3083	4,9153
Subtotal 14		0	0	8,0158	0,3083	8,3241
15	Magelang Selatan	0	0	0,0332	0	0,0332
	Magelang Tengah			1,5016	0,0105	1,5121
	Magelang Utara			0,5590	0,0913	0,6504
Subtotal 15		0	0	2,0938	0,1018	2,1956
Total Kota Magelang		0,7940	25,310	237,2177	7,1315	270,453

Sumber: Penyusun, 2025

Luas lahan prioritas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi RTH publik seluruhnya seluas 270,453 hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui luas lahan potensial yang diprioritaskan dapat memenuhi kekurangan RTH publik di Kota Magelang yang kurang 182,65 Hektar. Lahan potensial dengan kelas prioritas 8 memiliki jumlah luasan terluas diantara 15 kelas yang lain yaitu sebesar 50,49 Hektar atau setara dengan 18,67% dari seluruh lahan prioritas. Berikut ini merupakan lahan prioritas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi RTH publik berdasarkan tipe hak tanahnya.

Tabel 4. 11 Lahan Prioritas Potensi RTH Publik berdasarkan Tipe Hak Tanah

Tipe Hak Tanah	Peta	Luas
Aset Pemerintah Daerah		0,794 Hektar
Hak Pakai		25,310 Hektar

Tipe Hak Tanah	Peta	Luas
Hak Milik		244,349 Hektar

Sumber: Penyusun, 2025

Berdasarkan jenis hak tanahnya, tanah dengan jenis hak milik sudah bersertipikat memiliki luas terbesar yaitu 237,217 Hektar. Sedangkan tanah dengan status aset pemerintah daerah memiliki luasan terkecil yaitu 0,794 hektar. Kelas prioritas 1 dan 2 seluruhnya merupakan lahan dengan tipe hak aset pemerintah daerah. RTH publik lebih mudah dikembangkan menggunakan lahan dengan status aset pemerintah daerah, hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari staff Penata Ruang Ahli Muda DPUPR Kota Magelang bahwa untuk mengatasi keterbatasan dana dalam mengembangkan RTH publik salah satu upayanya adalah dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah. Berikut ini merupakan dokumentasi kondisi lahan prioritas yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi RTH publik.

Tabel 4. 12 Dokumentasi Lahan Prioritas Potensi RTH Publik

Kecamatan	Tipe Hak	Dokumentasi
Magelang Selatan	Aset Pemerintah Daerah	
Magelang Selatan	Hak Milik	
Magelang Selatan	Hak Milik	
Magelang Selatan	Hak Pakai	
Magelang Tengah	Hak Pakai	

Kecamatan	Tipe Hak	Dokumentasi
Magelang Utara	Hak Pakai	
Magelang Utara	Hak Milik	
Magelang Utara	Hak Milik	
Magelang Utara	Hak Milik	

Sumber: Penyusun, 2025

Jenis hak dari lahan yang berpotensi untuk pengembangan RTH publik diantaranya adalah Hak Pakai, Aset Pemerintah Daerah, dan Hak Milik baik yang sudah memiliki sertipikat maupun belum bersertipikat. Berdasarkan kondisi hasil analisis yang telah divalidasi di lapangan, lahan prioritas tersebut jenis penggunaan lahannya adalah lahan kosong, semak belukar, dan pertanian yang meliputi sawah, kebun campuran, serta tegalan/ladang. Lahan-lahan tersebut saat ini termasuk dalam kategori non terbangun dikarenakan tidak ada bangunan permanen di atasnya, namun di beberapa tempat terdapat bangunan non permanen seperti bangunan pedangan kaki lima.

4.4 Analisis Penentuan Strategi untuk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik

Strategi untuk pengembangan RTH publik di Kota Magelang ditentukan berdasarkan pengolahan data melalui analisis SWOT. Berikut merupakan rincian tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT.

4.4.1 Penentuan Faktor IFAS dan EFAS

Identifikasi faktor internal dan faktor eksternal dilakukan pada awal tahap analisis SWOT. Analisis SWOT ini dilakukan untuk dapat mengoptimalkan kekuatan dan peluang, di sisi lain juga meminimalisir kelemahan dan ancaman.

Tabel 4. 13 Faktor IFAS

KEKUATAN (S)	
No.	Atribut/Faktor
1.	RTH sebagai penyerap polusi udara
2.	RTH sebagai penyerap limpasan air hujan
3.	RTH menambah estetika kota
4.	RTH seperti taman kota dan jalur hijau dilakukan pemeliharaan berkala
5.	RTH yang ada saat ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik
6.	Serah terima PSU perumahan
KELEMAHAN (W)	
No.	Atribut/Faktor
1.	Keterbatasan Lahan
2.	Dana untuk pengembangan RTH terbatas
3.	Persebaran RTH publik tidak merata
4.	Terbatasnya SDM pada pemerintah
5.	Kerjasama antar lembaga pemerintah masih kurang

Sumber: Penyusun, 2025

Internal Factor Analysis Summary (IFAS) berisi faktor-faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan merupakan aspek positif yang menjadi keunggulan RTH publik. Sedangkan kelemahan menggambarkan hambatan internal yang dapat mengganggu dalam melakukan pengembangan RTH publik.

Tabel 4. 14 Faktor EFAS

PELUANG (O)	
No.	Atribut/Faktor
1.	Bantuan pemerintah pusat
2.	Adanya lahan kosong bersyarat yang berpotensi dikembangkan

PELUANG (O)	
3.	Kerjasama dengan pihak swasta
4.	Adanya aturan penetapan luasan dan lokasi RTH
5.	Mengembangkan RTH sebagai sarana rekreasi dan wisata
6.	Peran serta masyarakat
7.	Meningkatkan persebaran RTH
ANCAMAN (T)	
No.	Atribut/Faktor
1.	Alih fungsi RTH
2.	Pertumbuhan kota yang masif
3.	Pencemaran udara
4.	Peningkatan laju pertumbuhan penduduk
5.	Biaya perawatan dan operasional Ruang Terbuka Hijau cukup mahal

Sumber: Penyusun, 2025

External Factor Analysis Summary (EFAS) meliputi faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan RTH publik. Di sisi lain ancaman merupakan tantangan dari lingkungan eksternal yang berpotensi merugikan.

4.4.2 Perhitungan Matriks IFAS dan EFAS

Data kuesioner faktor internal (IFAS) dilakukan pengolahan, salah satunya adalah perhitungan bobot untuk setiap faktor. Rating faktor kekuatan (*strengths*) no. 1 dihitung dari rata-rata setiap jawaban responden. Masing-masing rating yang diberikan oleh responden terhadap faktor no. 1 dijumlahkan, kemudian dibagi oleh banyaknya responden. Dengan demikian akan didapatkan hasil rating untuk faktor kekuatan no. 1. Begitupun perhitungan untuk setiap faktor eksternal.

Bobot untuk faktor internal yang meliputi seluruh kekuatan dan kelemahan total bobotnya adalah 1. Hal ini juga berlaku untuk bobot bagi faktor eksternal yaitu peluang serta ancaman. Sebelum melakukan perhitungan bobot untuk setiap faktor internal, terlebih dahulu dilakukan perhitungan total nilai/*rating*. Pengolahan untuk faktor kekuatan no.1 adalah seluruh nilai yang diberikan responden dikalikan dengan skala kepentingannya. Berikut contoh perhitungannya:

$$\text{Total Nilai} = (0 \times 1) + (1 \times 2) + (2 \times 3) + (1 \times 4)$$

$$\text{Total Nilai} = 12$$

Perhitungan total nilai dilakukan untuk masing-masing faktor internal, setelah didapatkan hasilnya, selanjutnya diumlahkan seluruh total nilai, pada tabel di atas ditunjukkan dengan Total IFAS yang berjumlah 138. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot pada faktor kekuatan yang pertama, caranya adalah total nilai faktor pertama dibagi dengan total nilai IFAS.

Bobot = Total Nilai faktor no. 1 / Total Nilai IFAS

Bobot = 15 / 138

Bobot = 0,11

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa bobot faktor kekuatan no. 1 adalah 0,11. Perhitungan tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor baik internal maupun eksternal.

Tabel 4. 15 Perhitungan Matriks IFAS

IFAS									
Items	Penilaian Responden				Jumlah Responden	Total Nilai	Bobot	Rating	Skor
	1	2	3	4					
S1	0	0	1	3	4	15	0,11	4	0,44
S2	0	0	2	2	4	14	0,10	4	0,40
S3	0	0	2	2	4	14	0,10	4	0,40
S4	0	0	2	2	4	14	0,10	4	0,40
S5	0	1	2	1	4	12	0,09	3	0,27
S6	0	1	2	1	4	12	0,09	3	0,27
Subtotal <i>Strengths</i> (S)						81	0,59		2,18
W1	0	0	2	2	4	14	0,10	4	0,40
W2	0	0	3	1	4	13	0,09	3	0,27
W3	0	2	2	0	4	10	0,07	3	0,21
W4	0	3	1	0	4	9	0,07	2	0,14
W5	0	1	3	0	4	11	0,08	3	0,24
Subtotal <i>Weaknesses</i> (W)						57	0,41		1,26
TOTAL IFAS						138	1		3,44
Selisih (S-W)									0,92

Sumber: Penyusun, 2025

Skor dihitung setelah diketahui *rating* dan bobot masing-masing faktor, caranya adalah mengalikan antara *rating* dan bobot untuk masing-masing faktor IFAS. Berdasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada faktor IFAS skor tertinggi dimiliki oleh faktor kekuatan no. 1 yaitu RTH sebagai penyerap polusi udara dengan skor akhir 0,44, hal tersebut berarti faktor tersebut sangat berpengaruh. Sedangkan skor terkecil

ada pada faktor kelemahan no. 4 yaitu terbatasnya SDM pada pemerintah, dengan skor akhir 0,14.

Tabel 4. 16 Perhitungan Matriks EFAS

EFAS									
Items	Penilaian Responden				Jumlah Responden	Total Nilai	Bobot	Rating	Skor
	1	2	3	4					
O1	0	1	2	1	4	12	0,09	3	0,27
O2	0	2	2	0	4	10	0,08	3	0,24
O3	0	0	4	0	4	12	0,09	3	0,27
O4	0	0	3	1	4	13	0,10	3	0,30
O5	0	1	1	2	4	13	0,10	3	0,30
O6	0	0	3	1	4	13	0,10	3	0,30
O7	0	2	1	1	4	11	0,09	3	0,27
Subtotal <i>Opportunities</i> (O)						84	0,65		1,95
T1	1	1	1	1	4	10	0,08	3	0,24
T2	2	0	1	1	4	9	0,07	2	0,14
T3	1	3	0	0	4	7	0,06	2	0,12
T4	2	1	1	0	4	7	0,06	2	0,12
T5	0	2	2	0	4	10	0,08	3	0,24
Subtotal <i>Threats</i> (T)						43	0,35		0,86
TOTAL EFAS						127	1		2,81
Selisish (O – T)									1,09

Sumber: Penyusun, 2025

Perhitungan *rating*, bobot, dan skor pada faktor eksternal (EFAS) caranya sama dengan perhitungan faktor internal (IFAS). Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil berupa skor tertinggi ada pada faktor peluang no. 5 dan 6 dengan skor akhir 0,3. Sedangkan skor terendah ada faktor ancaman yaitu 0,12. Hal tersebut berarti bahwa faktor peluang lebih banyak pengaruhnya daripada faktor ancaman.

4.4.3 Matriks I-E

Penentuan posisi matriks I-E dilakukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya yang dilakukan pada skor faktor internal dan skor faktor eksternal. Skor IFAS sebesar 3,46 yang berasal dari jumlah skor antara kekuatan dan kelemahan. Sedangkan jumlah skor dari faktor peluang dan ancaman atau skor EFAS sebesar 2,81. Skor tersebut selanjutnya dituangkan dalam matriks *Wheelen* atau yang lebih dikenal dengan matriks I-E.

		IFAS			
		Strength		Average	Weak
		4	3	2	1
EFAS	High	I Grow and Build	II Grow and Build	III Hold and Maintain	
	Middle	IV Grow and Build	V Hold and Maintain	VI Harvest and Divest	
	Low	VII Hold and Maintain	VIII Harvest and Divest	IX Harvest and Divest	
		3	2	1	

Sumber: Adaptasi Penyusun (2025), Asmoro & Rahayu (2019)

Gambar 4. 3 Matriks I-E

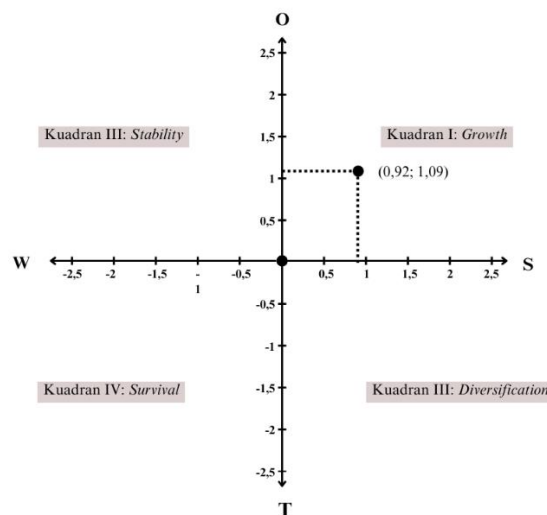
Grow and Build yang ada pada area IV menggambarkan bahwa Kota Magelang perlu suatu strategi untuk tumbuh dan dapat mengembangkan RTH publik sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini & Santoso (2017) dan posisi di area IV tersebut menurut Wahmil *et al.* (2024) kondisi internal memiliki posisi kuat dan kondisi eksternal di posisi sedang. Dalam hal ini, strategi yang dapat diterapkan yaitu strategi intensif yang mencakup penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar dan strategi interaktif seperti integrasi ke depan, integrasi ke belakang dan integrasi horizontal (E. Utami & Widodo, 2022). Strategi intensif berfokus terhadap ekspansi dan optimalisasi lahan. Berdasarkan kondisi RTH publik saat ini, strategi intensif dipilih untuk memperkuat posisi dan memaksimalkan potensi dalam pengembangan RTH publik. Strategi penetrasi pasar bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan RTH publik yang sudah ada dengan demikian dapat membantu untuk memastikan RTH publik yang sudah ada tidak terbengkalai. Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan mengembangkan RTH publik salah satunya dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah atau lahan non terbangun yang tidak terpakai sesuai dengan program yang tertera dalam RTRW Kota Magelang Tahun 2011 – 2031 bahwa penyediaan dan pemenuhan RTH publik sebesar 20% melalui pembebasan lahan. Strategi pengembangan produk fokus untuk meningkatkan kualitas dan fungsi dari RTH publik yang didalamnya termasuk sebagai penyerap polusi udara dan penyerap air hujan.

Strategi integratif menekankan terhadap kolaborasi eksternal seperti kemitraan dan sinergi antar lembaga yang berkaitan terhadap pengembangan RTH publik. Strategi ini meliputi integrasi ke depan, ke belakang, dan integrasi horizontal. Integrasi ke depan

bertujuan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang dapat dilakukan dengan pelibatan komunitas hijau. Integrasi ke belakang fokus untuk meningkatkan sumber daya pendukung RTH publik seperti bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk pengembangan metode konservasi. Integrasi horizontal dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama antar OPD untuk mengintegrasikan pengembangan RTH publik dengan sektor pariwisata, kolaborasi dengan sektor swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut berkaitan dengan faktor yang mendasari terjadinya fenomena RTH publik Kota Magelang kurang dari 20% yaitu bagian tata Kelola yang mana menurut Fitriyani *et al.* (2021) koordinasi antar OPD, pihak swasta, dan masyarakat belum berkelanjutan. Melalui strategi integratif ini, tata kelola RTH publik dapat dilakukan dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, pasal 6 huruf b disebutkan bahwa masyarakat berperan untuk bekerja sama baik dengan pemerintah atau antar masyarakat dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penataan RTH, pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa masyarakat turut berperan dalam penataan, pengelolaan, dan pembiayaan RTH.

4.4.4 Kuadran SWOT

Kuadran SWOT digunakan untuk mengetahui dimana posisi titik (X,Y) berada sehingga strategi yang tepat digunakan dapat diketahui berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya.



Sumber: Adaptasi Penysun (2025), Asmoro & Rahayu (2019)

Gambar 4. 4 Kuadran SWOT

Dari keempat kuadran di atas, berdasarkan perhitungan faktor IFAS dan EFAS sebelumnya dapat diketahui posisi titik koordinat (X,Y) yaitu (0,92; 1,09), sehingga posisi titik berada pada kuadran I yang berada di antara kekuatan (S) dan peluang (O). Titik (X,Y) merupakan hasil dari pengurangan antara kekuatan dengan kelemahan dan selisih dari peluang dengan ancaman. Koordinat tersebut di posisi kuadran I yang berarti penerapan strateginya yang bersifat mendorong kebijakan pertumbuhan yang agresif..

Gambar 4.4 di atas menunjukkan analisis SWOT terbagi menjadi empat kuadran yaitu kuadran I, II, III, dan IV.

a. Kuadran I

Menggambarkan situasi yang menguntungkan, pengembangan RTH publik memiliki kekuatan dan peluang. Dengan demikian melalui pemanfaatan kekuatan dan peluang dapat dijadikan keuntungan untuk pengembangan RTH publik.

b. Kuadran II

Pengembangan RTH publik mempunyai beberapa ancaman, namun di sisi lain juga terdapat kekuatan internal. Strateginya adalah memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman dengan cara strategi diversifikasi.

c. Kudran III

Kuadran III menggambarkan pengembangan RTH memiliki peluang namun juga menghadapi kendala berupa kelemahan internal. Hal tersebut dilakukan strategi yang dapat meminimalisir kelemahan internal sehingga nantinya dapat memiliki peluang lebih besar.

d. Kuadran IV

Kuadran IV merupakan gambaran bagi pengembangan RTH yang situasinya tidak menguntungkan. Dalam pengembangan RTH mengalami berbagai ancaman dari luar dan menghadapi kelemahan internal. Strategi bertahan yaitu strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kelemahan dan mencegah ancaman yang datang.

Strategi yang cocok untuk pengembangan RTH publik berdasarkan hasil analisis adalah strategi yang terletak pada kuadran I yaitu strategi progresif dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

4.4.5 Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dalam pengembangan RTH publik. Dalam

matriks SWOT ini memiliki empat strategi yang berkemungkinan menjadi alternatif strategi pengembangan RTH publik.

Tabel 4. 17 Matriks SWOT

Faktor IFAS Faktor EFAS	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
	(S1) RTH sebagai penyerap polusi udara (S2) RTH sebagai penyerap limpasan air hujan (S3) RTH menambah estetika kota (S4) RTH seperti taman kota dan jalur hijau dilakukan pemeliharaan berkala (S5) RTH yang ada saat ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik (S6) Serah terima PSU perumahan	(W1) Lahan yang dapat dikembangkan terbatas (W2) Dana untuk pengembangan RTH terbatas (W3) Persebaran RTH publik tidak merata (W4) Terbatasnya SDM pada pemerintah (W5) Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah
Peluang (Opportunities)	Strategi S-O	Strategi W-O
(O1) Bantuan pemerintah pusat (O2) Adanya lahan kosong bersyarat yang berpotensi dikembangkan (O3) Kerjasama dengan pihak swasta (O4) Adanya aturan penetapan luasan dan lokasi RTH (O5) Mengembangkan RTH sebagai sarana rekreasi dan wisata (O6) Peran serta masyarakat (O7) Meningkatkan persebaran RTH	S1, S2, - O1, O2, O7, O6 Memanfaatkan lahan yang ada secara optimal dengan bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan persebaran RTH, serta peran masyarakat dalam pengelolaan RTH agar berfungsi dengan optimal sebagai penyerap polusi udara maupun air hujan. S6, - O3, O4, O7 Meningkatkan persebaran RTH dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta melalui serah terima RTH Privat yang ada di lingkungan perumahan menjadi RTH publik S3, - O3, O5, O7 Bekerjasama dengan pihak swasta dan integrasi antar OPD untuk mengembangkan RTH publik berbasis wisata.	W1, W2 - O1, O3, O5 Bekerja sama dengan pihak swasta, masyarakat, dan menggunakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan lahan dan kekurangan dana W5 - O1 Melakukan koordinasi lintas instansi, pemerintah pusat dapat memberi bantuan melalui kebijakan regulasi atau pedoman teknis untuk pembagian wewenang dan tanggung jawab setiap instansi dalam mengembangkan RTH publik

Ancaman (Threats)	Strategi S-T	Strategi W-T
(T1) Alih fungsi RTH (T2) Pertumbuhan kota yang masif (T3) Pencemaran udara (T4) Peningkatan laju pertumbuhan penduduk (T5) Biaya perawatan dan operasional Ruang Terbuka Hijau cukup mahal	S4, S5, - T1, T2, T3 Pemerintah mengelola dan memanfaatkan RTH yang sudah ada dengan baik, mencegah terjadinya alihfungsi lahan yang disebabkan oleh pembangunan kota serta pertambahan jumlah penduduk dengan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. S1, S4, S5 - O3 Mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara memaksimalkan manfaat dari RTH yaitu penyerap polusi udara dan menjaganya melalui pemeliharaan berkala terhadap RTH.	W1, W2 - T1, T2, T3 Melakukan pengawasan untuk menjaga RTH publik yang telah ada dan lahan-lahan yang berpotensi menjadi RTH agar tidak beralih fungsi menjadi lahan terbangun

Sumber: Adaptasi Penyusun (2025), Talantan *et al.* (2022)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dalam matriks I-E dengan posisi di kuadran IV memunculkan strategi yang bersifat intensif serta dalam kuadran SWOT yang menunjukkan posisi pada kuadran I, strategi S-O dapat membantu dalam pengembangan RTH publik. Strategi S-O yang pertama yang bersifat intensif khususnya dalam pengembangan produk, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat. Mengingat fungsi RTH sebagai penyerap udara yang tercemar dan sebagai resapan air hujan, maka dalam hal pengelolaannya sangat terikat dengan masyarakat. Menurut Amri *et al.* (2023) tahapan strategi yang dapat dilakukan untuk menambah luasan RTH salah satunya dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk turut merencanakan, membangun, dan mengelola RTH bersama lembaga pemerintahan terkait.

Strategi S-O yang bersifat intensif dan berkaitan dengan pengembangan pasar yaitu peningkatan persebaran RTH dengan memanfaatkan lahan yang berpotensi menjadi RTH publik dengan optimal, sesuai dengan hasil analisis prioritas lahan potensial pengembangan RTH publik di Kota Magelang yang telah dilakukan sebelumnya, lahan yang dapat dikembangkan prioritas pertama adalah lahan milik pemerintah untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan RTH publik. Islami & Suheri (2018) merumuskan strategi untuk pengembangan RTH yaitu melibatkan pihak swasta, masyarakat, dan menggunakan bantuan dari pemerintah pusat untuk memecahkan masalah keterbatasan lahan dengan cara pembebasan lahan. Selain itu, karena strategi ini berfokus terhadap

penambahan luasan maka jumlah dan luas RTH publik dapat ditambah melalui serah terima PSU perumahan yang sebelumnya bersifat privat menjadi publik.

Strategi S-O yang terakhir yaitu dapat bekerjasama dengan sektor swasta untuk melakukan pengembangan RTH publik yang berbasis pariwisata. Hal ini berkaitan dengan strategi dengan pendekatan penetrasi pasar yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan RTH publik yang sudah ada guna memastikan fungsinya tetap terjaga dan tidak terlanter sesuai dengan fungsi ekstrinsik yang tertera dalam Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan salah satunya yaitu RTH mempunyai fungsi sebagai tempat rekreasi.

Pelaksanaan pengembangan RTH publik tersebut perlu melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hidayani & Warsono (2017), yang mengemukakan bahwa pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat merupakan komponen yang terlibat dalam pengembangan RTH. Strategi S-O yang bersifat integratif juga memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, integrasi ke depan dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat dengan pelibatan komunitas hijau untuk pengelolaan RTH publik. Integrasi ke dilakukan dengan meningkatkan sumber daya pendukung RTH publik seperti bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk pengembangan metode konservasi. Integrasi horizontal dilakukan melalui kerja sama antar OPD untuk mengintegrasikan pengembangan RTH publik dengan sektor pariwisata.

Strategi lain yang dapat menjadi alternatif diantaranya adalah strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi W-O merupakan strategi yang berusaha untuk mengatasi kekurangan dengan memanfaatkan peluang. Dalam hal mengembangkan RTH publik terdapat kendala berupa keterbatasan lahan dan minimnya dana. Maka dari itu strategi yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam penyediaan lahan, serta memanfaatkan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan dana. Koordinasi antar instansi pemerintah yang masih kurang dapat ditangani dengan bantuan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pembagian wewenang dalam pengembangan RTH publik berjalan efektif.

Ancaman dalam mengembangkan RTH publik dapat diatasi menggunakan kekuatan internal, ini merupakan definisi dari strategi S-T. Kota yang terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan ancaman berupa alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah pemerintah

melakukan pengelolaan dan memanfaatkan RTH yang sudah ada secara optimal agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan mengurangi pencemaran udara. Strategi terakhir yang dapat menjadi salah satu opsi adalah strategi W-T yaitu strategi yang mengurangi kelemahan dan mengantisipasi ancaman. Dari kelemahan dan ancaman yang kemungkinan terjadi adalah melakukan pengawasan terhadap RTH publik yang sudah ada dan lahan potensial agar tidak terjadi alih fungsi lahan.

Merujuk pada hasil perhitungan matriks IFAS dan EFAS, dari seluruh strategi yang ada, strategi yang diutamakan adalah strategi S-O. Sesuai dengan posisi kuadran matrik I-E dan kuadran SWOT yaitu strategi agresif. Strategi yang dipilih bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang bersifat agresif dan berfokus terhadap ekspansi serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Apabila strategi diterapkan dalam pengembangan RTH publik untuk peningkatan luas RTH publik dengan lahan yang dipilih adalah lahan yang potensial sesuai dengan urutan prioritasnya, maka kekurangan RTH publik di Kota Magelang berdasarkan luas wilayahnya dapat terpenuhi minimal 20%.

Pengembangan RTH publik diperlukan mengingat pertumbuhan kota dan pertumbuhan penduduk terus terjadi yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Adanya Ruang Terbuka Hijau akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan seperti pengendali iklim mikro, penurun suhu udara, dan menambah estetika kota. Iklim mikro terdiri dari beberapa unsur, salah satunya adalah suhu udara (Zubair *et al.*, 2017). Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, suhu udara di Kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 25,98 °C meningkat di tahun 2023 menjadi 27,82 °C. Menurut Dewi (2010) RTH memiliki keterkaitan terhadap penyerapan gas karbon, luas minimal RTH adalah 30% di setiap kota dengan 20% RTH publik sebagai pertimbangan daya guna RTH untuk menyerap minimal jumlah gas karbon. Dengan demikian usaha untuk mencegah dan mengatasi perubahan iklim adalah dengan menambah serta mempertahankan Ruang Terbuka Hijau. Berikut ini merupakan kriteria RTH yang wajib dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas RTH menurut Zubair *et al.* (2017):

- a. Pohon dengan karakteristik tajuk/kanopi yang seimbang antara ukuran batang dengan tajuknya;
- b. Hamparan rumput sebagai elemen dasar penutup lahan hijau;

- c. Tanaman perdu berbunga yaitu tanaman berukuran rendah dengan variasi warna bunga yang menarik, hal ini berkaitan dengan estetika kota;
- d. Pohon peneduh yang mampu menyerap polusi udara;
- e. Vegetasi yang memiliki aroma khas yang dapat berfungsi untuk mereduksi polusi udara;
- f. Pemilihan jenis vegetasi mempertimbangkan aspek keamanan bagi lingkungan dan masyarakat;
- g. Sarana prasarana pendukung RTH untuk menunjang aktivitas masyarakat.